

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A., Muslim, M. dkk, 2002, *Good governance dan Penguatan Institusi Daerah*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.
- Basri, Yesi Mutia. 2008. *Pengaruh pengetahuan Dewan tentang Anggaran. Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Volume 8, Nomor 1. Januari 2008. pp. 29-39.
- Coryanata, Isma. 2007. *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Darma, Jufri. 2012. *Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah*. Jurnal Mediasi Vol.4 No.1. Universitas negeri Medan.
- Djawasa, Siti Nurlia. 2011. *Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Pengawasan APBD (Pada DPRD Kabupaten Bone Bolango)*. Universitas Negeri Gorontalo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Skripsi.
- Fatchurrochman, Agam, 2002, *Manajemen Keuangan Publik*, Materi Pelatihan Anti Korupsi, Indonesian Corruption Watch, 23-25 Januari 2002, Jakarta.
- Ghozali, Imam, 2002, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul, 2003, *Bunga Rampai Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Jogjakarta.
- Indriyantoro dan Supomo, 1999, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPF, Yogyakarta.
- Indradi, Syamsiar, 2001, *Pengaruh Pendidikan dan Pengalaman anggota DPRD dengan Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang.
- Junaedi, 2008, *Ekonometrika*, Universitas Jambi, Modul.
- Juliastuti, Ayu. 2013. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. Universitas Negeri Padang.
- Kaiser, H. dan Rice, J., 1974, *Educational and Psychological Measurement*, Volume 34, No .1, Page 111-117.

- Kurniawan, Arif. 2012. *Pengaruh Partisipasi masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Akuntabilitas Publik Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Penyusunan APBD (Studi Empiris pada DPRD Kota Surakarta Jawa Tengah)*, universitas muhammadiyah Surakarta: Fakultas Ekonomi. Skripsi.
- Mustofa, Chabib. 2004. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Modul.
- Mayasari, Rosalia. 2009. “*Pengaruh Kualitas anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD Dengan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Variabel Moderating*”. Universitas Tridianti Palembang.
- Mardiasmo, 2001, *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Andi, Jogjakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Andy. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2003, *Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Layanan Publik*. Majalah Swara MEP, Vol. 3 No. 8 Maret. MEP UGM:Jogjakarta.
- Nunnally, 1967, *Psychometric Theory*, McGraw-Hill, New York.
- Pramono, Agus H., 2002, *Pengawasan Legislative terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang.
- Pramita, Yulinda Devi dan Andriyani, Lilik. 2010. *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Rahmawati, Arini Ayu. 2013. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi kebijakan publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Pada DPRD Kabupaten Sukoharjo)*. Fakultas Ekonomi:UMS. Skripsi.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2005.
- _____, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Departemen Komunikasi dan Informasi, Jakarta, 2005.
- _____, *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____, *Keppres No. 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- _____, *Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran*.

- Rubin, Irene, 1996, Budgetting for Accountability: Municipal Budgeting for the 1990s, *Jurnal Public Budgeting & Finance*, Summer, hal. 112-132.
- Santoso, Singgih. 2003. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Setyawati, Yuni. 2010. *Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan keuangan Daerah (APBD) Dengan Partisipasi masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik*. Tesis. Fakultas Ekonomi: UNS.
- Sopanah dan Mardiasmo, 2003, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah*, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI 16-17 Oktober di Surabaya.
- Sopanah, 2004, *Menyoal Anggaran Publik*, dalam *Pesangon Gate*, Bulletin Suara Korban, Malang Corruption Watch (MCW), Edisi 1 Maret 2004.
- Sopanah dan Wahyudi, Isa, 2008, *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*, Malang Corruption Watch (MCW), SNA XIII.
- Sulistoni, G., 2003, *Fiqh korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*, SOMASI, Nusa Tenggara Barat.
- Utomo, Hari. 2011. *Determinasi hubungan pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan Pengawasan dewan pada keuangan Daerah (APBD)*. Universitas Diponegoro:Semarang.
- Utami, Kurnia dan Syofyan, Efrizal. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik*. *Jurnal WRA*, Vol. 1, N0.1. Fakultas Ekonomi: UNP.
- Widyaningsih, Aristanti dan Pujirahayu, Imanier. 2012. “*Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Tentang Anggran Terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderating*”. Falkultas Ekonomi dan Bisnis:UPI.
- Winarna, Jaka dan Murni, Sri. 2007. *Pengaruh Personal Bacground, Political Bacground, dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Study Kasus Di Karesidenan Surakarta Dan Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 2006)*. Universitas Sebelas Maret, SNA X.
- Werimon, Simson, Ghozali, Imam, dan Nazir, Mohamad. 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Study Empiris Di Propinsi Papua)*, SNA X.

- Wulandari, Trini dan Deviani. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Akuntabilitas Publik. Jurnal WRA*, Vol.1 No.2. Fakultas Ekonomi: UNP.
- Yudoyono, Bambang, 2002, *Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, <http://www.bangda.depdagri.go.id./jurnal/jendela/jendela3.htm>.
- Yuriyuda. 2010. *MSI (Method of Successive Interval) Langkah Manual dan Software*. www.carabineri.wordpress.com. Diakses tanggal 10 Juni 2011.
- Zainuddin dkk., *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia. Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2002.